

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK
BERDASARKAN INDEKS SAHAM (LQ45) DAN JENIS SEKTOR
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Shelia Josephine Okvania
2014130090

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018

**COMPARATIVE ANALYSIS OF WHISTLEBLOWING SYSTEM
DISCLOSURE IN PUBLIC COMPANIES BASED ON THE STOCK
INDEX (LQ45) AND THE TYPE OF SECTOR
(EMPIRICAL STUDY OF COMPANIES LISTED ON IDX)**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics*

By
Shelia Josephine Okvania
2014130090

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK
BERDASARKAN INDEKS SAHAM (LQ45) DAN JENIS SEKTOR
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI)**

Oleh:

Shelia Josephine Okvania
2014130090

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

ub

Gery Raphaël Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing Skripsi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Shelia Josephine Okvania
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Oktober 1996
NPM : 2014130090
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK BERDASARKAN INDEKS
SAHAM (LQ45) DAN JENIS SEKTOR
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan : Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2018

Pembuat pernyataan :



(Shelia Josephine Okvania)

ABSTRAK

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan peraturan Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat perusahaan yang belum mengungkapkan *whistleblowing system* pada laporan tahunannya. Hal ini karena ketidakjelasan regulator dalam menguraikan komponen *whistleblowing system* yang harus diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan.

Dalam membangun citra perusahaan yang baik, perusahaan membutuhkan suatu tata kelola yang mengikuti pedoman *Good Corporate Governance*. *Whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan, yang merupakan pengungkapan tindakan perbuatan atau kecurigaan terhadap adanya pelanggaran, tidak etis, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. *Whistleblowing system* dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, salah satunya adalah untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya pelanggaran.

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi deskriptif, dimana penggambaran permasalahan berdasarkan karakteristik setiap kelompok. Penjelasan atas analisis akan dilakukan secara terperinci. Objek penelitian yang digunakan adalah pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan berasal dari semua sektor. Terdapat sembilan sektor di Bursa Efek Indonesia dengan masing-masing diambil empat sampel perusahaan.

Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat beberapa perusahaan yang belum mengungkapkan *whistleblowing system* pada laporan tahunannya, akan tetapi perusahaan publik di Indonesia semakin mematuhi aturan dari Bapepam-LK. Persentase pengungkapan *whistleblowing system* perusahaan publik pada tahun 2014-2016 berturut-turut adalah 28,06%; 36,27%; dan 44,77%. Persentase pengungkapan *whistleblowing system* pada perusahaan LQ45 adalah 39,54% dan untuk perusahaan non-LQ45 adalah 32,54%, sehingga pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan yang termasuk indeks LQ45 lebih unggul 7% dibandingkan dengan non-LQ45. Selain itu, dari sembilan sektor di Bursa Efek Indonesia, hanya *finance sector* yang memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai *whistleblowing system*. Persentase pengungkapan *whistleblowing system* tertinggi adalah *infrastructure, utilities, and transportation sector*, yaitu sebesar 62,75% dan urutan kedua adalah *finance sector* sebesar 57,85%. Walaupun *finance sector* tidak menempati urutan pertama, tetapi jika dihitung melalui sebaran data, persentase pengungkapan *whistleblowing system* di setiap perusahaan *finance sector* lebih merata dibandingkan dengan *infrastructure, utilities, and transportation sector*.

Kata kunci: Sistem Pelaporan Pelanggaran, Pengungkapan, Jenis Sektor, Indeks Saham LQ45

ABSTRACT

Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) issued Regulation No. KEP-431 / BL / 2012 dated August 1, 2012 regarding the Issuance of Annual Reports of Issuers or Public Companies that require companies to disclose whistleblowing systems in the company's annual report. However, there are still companies that have not disclosed whistleblowing systems in their annual reports. This is because the regulator's uncertainty in describing the whistleblowing system component should be disclosed in the company's annual report.

In building a good corporate image, the company needs an ordinance that follows the guidelines of Good Corporate Governance. The whistleblowing system is part of the company's internal control system, which is the disclosure of an act of action or suspicion of any offense, unethical, or other conduct that may harm the organization or the stakeholders. Whistleblowing systems can provide many benefits to the company, one of which is to prevent and detect the occurrence of violations.

The research method used is descriptive study, where the description of the problem has rules and characteristics of each group. Explanation of the analysis will be done in detail. The research object used is the disclosure of whistleblowing system in the annual report of companies listed in Indonesia Stock Exchange and derived from all sectors. There are nine sectors in Indonesia Stock Exchange with each taken four companies as sample.

The result of this research is there are some companies that have not disclosed whistleblowing system in its annual report, but public companies in Indonesia increasingly obey the rules of Bapepam-LK. The percentage of disclosure of public company's whistleblowing system in 2014-2016 is 28.06%; 36.27%; and 44.77%. The percentage of disclosure of whistleblowing system in company LQ45 is 39,54% and for non-LQ45 company is 32,54%, so disclosure of whistleblowing system in the company's annual report which included in LQ45 index is 7% higher than non-LQ45. In addition, of the nine sectors of the Indonesia Stock Exchange, only finance sectors have special regulations governing whistleblowing systems. The highest percentage of disclosure of whistleblowing system is infrastructure, utilities, and transportation sector, which is 62.75% and second is finance sector of 57.85%. Although finance sector does not place the first rank, but if calculated through the distribution of data, the percentage of disclosure of whistleblowing system in every finance sector is more equitable than infrastructure, utilities, and transportation sector.

Keywords: Whistleblowing System, Disclosure, Type of Sector, Stock Index LQ45

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEPATUHAN PENGUNGKAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK BERDASARKAN INDEKS SAHAM (LQ45) DAN JENIS SEKTOR (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dari Universitas Katolik Parahyangan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis mengetahui bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papi dan Mami yang telah merawat, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Cliff, selaku adik penulis. Terima kasih telah menyemangati penulis selama ini.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku ketua program studi akuntansi sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama proses pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Amelia Setiawan, S.E., M.Ak., Ak., CISA selaku dosen seminar Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan masukan serta pengetahuan bagi penulis selama menempuh mata kuliah seminar.
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.

8. Linda Tiffany, terima kasih telah menyemangati dan memberikan saran bagi penulis. Terima kasih juga telah menjadi teman dan pendengar yang baik bagi penulis.
9. Melody dan Wina yang telah menemani penulis selama suka dan duka pembuatan skripsi, serta memberikan dukungan bagi penulis dan mewarnai hari-hari penulis selama kegiatan perkuliahan.
10. Manda dan Anne yang telah menjadi teman dekat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Shierly, Vania, Melvina, dan Christine, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Savenia dan Nadya yang telah menjadi sahabat penulis sejak SD. Terima kasih atas motivasi, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga atas kebersamaannya selama ini.
13. Ci Sely, Tomas, Bebet, Josh, dan teman-teman gereja penulis yang telah menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca. Terima kasih.

Bandung, Juli 2018

Penulis,

Shelia Josephine Okvania

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Kerangka Penelitian.....	4
1.6. Periode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. <i>Good Corporate Governance</i>	7
2.1.1. Maksud dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.1.2. Asas <i>Good Corporate Governance</i>	8
2.2. Sistem Pengendalian Internal	9
2.2.1. Fungsi Sistem Pengendalian Internal.....	10
2.2.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal	10
2.2.3. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal	12
2.3. <i>Whistleblowing System</i>	12
2.3.1. Manfaat <i>Whistleblowing System</i>	13
2.3.2. Tujuan <i>Whistleblowing System</i>	14
2.3.3. Peraturan Bapepam-LK mengenai <i>Whistleblowing System</i>	15
2.3.4. Kebijakan Perlindungan Pelapor	15

2.3.5. Struktur Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>	16
2.3.6. Pelaksanaan Investigasi Laporan Pelanggaran	17
2.4. Indeks LQ45	19
2.5. Jenis Sektor di Bursa Efek Indonesia	19
2.6. Pengungkapan Laporan Tahunan	20
2.7. <i>Content Analysis</i>	20
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	22
3.1. Metode Penelitian	22
3.1.1. <i>Identify a broad problem area</i>	22
3.1.2. <i>Define the problem statement</i>	23
3.1.3. <i>Develop hypotheses</i>	23
3.1.4. <i>Determine measure</i>	24
3.1.5. <i>Data collection</i>	27
3.1.6. <i>Data analysis</i>	27
3.1.7. <i>Interpretation of data</i>	28
3.2. Desain Penelitian	28
3.3. Objek Penelitian	29
3.3.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia	29
3.3.2. Sampel Penelitian	29
3.4. Profil Perusahaan	31
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Peraturan Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> pada Perusahaan Publik di Indonesia	44
4.2. Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> Perusahaan Publik di Indonesia	44
4.2.1. Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik Tahun 2014	45
4.2.2. Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik Tahun 2015	82

4.2.3.	Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik Tahun 2016	132
4.3.	Penilaian Kepatuhan terhadap Regulasi Bapepam-LK mengenai Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2014 sampai 2016	188
4.4.1.	Cara penyampaian laporan pelanggaran	188
4.4.2.	Perlindungan bagi pelapor	190
4.4.3.	Penanganan pengaduan.....	191
4.4.4.	Pihak yang mengelola pengaduan.....	193
4.4.5.	Hasil dari penanganan pengaduan	194
4.4.6.	Analisis Kepatuhan Perusahaan Publik terhadap Regulasi Bapepam-LK mengenai Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i>	195
4.4.	Penilaian Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik LQ45 dan Non-LQ45	198
4.5.	Penilaian Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik berdasarkan Jenis Sektor	200
4.6.	Peranan Penting <i>Whistleblowing System</i> bagi Perusahaan	203
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	206
5.1.	Kesimpulan	206
5.2.	Saran	207
	DAFTAR PUSTAKA.....	209
	RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	cli

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	25
Tabel 3.2 Sampel Perusahaan	30
Tabel 4.1 Poin Pengungkapan.....	30
Tabel 4.2 Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan 2014.....	45
Tabel 4.3 Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan 2015.....	82
Tabel 4.4 Pengungkapan Indikator <i>Whistleblowing System</i> pada Laporan Tahunan 2016.....	132
Tabel 4.5 Pengungkapan Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran	189
Tabel 4.6 Pengungkapan Perlindungan bagi Pelapor.....	190
Tabel 4.7 Pengungkapan Penanganan Pengaduan	192
Tabel 4.8 Pengungkapan Pihak yang Mengelola Pengaduan.....	193
Tabel 4.9 Pengungkapan Hasil dari Penanganan Pengaduan.....	194
Tabel 4.10 Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Tahun 2014-2016.....	196
Tabel 4.11 Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Perusahaan LQ45 dan Non-LQ45	198
Tabel 4.12 Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Berdasarkan Jenis Sektor.....	201

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	6
Gambar 2.1 Komponen <i>Internal Control</i>	11
Gambar 2.2 Kedudukan Unit Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	17
Gambar 3.1 Variabel Terkait.....	23
Gambar 4.1 Pengungkapan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2014 Kode W12	64
Gambar 4.2 Pengungkapan PT Jasa Marga Tbk 2014 Kode W12.....	67
Gambar 4.3 Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2014 Kode W12	72
Gambar 4.4 Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2014 Kode W17	73
Gambar 4.5 Pengungkapan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2014 Kode W12	78
Gambar 4.6 Pengungkapan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2015 Kode W12	109
Gambar 4.7 Pengungkapan PT Jasa Marga Tbk 2015 Kode W12.....	112
Gambar 4.8 Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2015 Kode W12	117
Gambar 4.9 Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2015 Kode W17	118
Gambar 4.10 Pengungkapan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2015 Kode W12	122
Gambar 4.11 Pengungkapan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2015 Kode W12	125
Gambar 4.12 Pengungkapan PT Bumi Resources Minerals Tbk 2015 Kode W12	130
Gambar 4.13 Pengungkapan PT Vale Indonesia Tbk 2016 Kode W12.....	138
Gambar 4.14 Pengungkapan PT Agung Podomoro Land Tbk 2016 Kode W12 ...	162

Gambar 4.15	Pengungkapan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 2016 Kode W12	166
Gambar 4.16	Pengungkapan PT Jasa Marga Tbk 2016 Kode W12.....	170
Gambar 4.17	Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2016 Kode W12	175
Gambar 4.18	Pengungkapan Bank Mandiri (Persero) Tbk 2016 Kode W17	176
Gambar 4.19	Pengungkapan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2016 Kode W12	179
Gambar 4.20	Pengungkapan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2016 Kode W12	182
Gambar 4.21	Pengungkapan Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran	19189
Gambar 4.22	Pengungkapan Perlindungan bagi Pelapor	191
Gambar 4.23	Pengungkapan Penanganan Pengaduan.....	192
Gambar 4.24	Pengungkapan Pihak yang Mengelola Pengaduan.....	194
Gambar 4.25	Pengungkapan Hasil dari Penanganan Pengaduan.....	1915
Gambar 4.26	Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Tahun 2014-2016.....	197
Gambar 4.27	Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Perusahaan LQ45 dan Non-LQ45	199
Gambar 4.28	Pengungkapan <i>Whistleblowing System</i> Berdasarkan Jenis Sektor...	202
Gambar 4.29	Regulasi <i>Finance Sector</i>	203

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
LAMPIRAN 1	
<i>SCREENSHOT</i> LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK 2014	xiii
LAMPIRAN 2	
<i>SCREENSHOT</i> LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK 2015	xlv
LAMPIRAN 3	
<i>SCREENSHOT</i> LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK 2016	xciv

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, proses bisnis berkembang cukup pesat, sehingga banyak persaingan yang timbul di setiap sektor perusahaan. Dalam membangun citra perusahaan yang baik, perusahaan membutuhkan suatu tata kelola perusahaan yang baik dengan mengikuti pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Selain itu, GCG juga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pemilik maupun penanam modal.

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Pengungkapan memiliki manfaat dalam tiga perspektif, yaitu: mengamankan akuntabilitas perusahaan dan pelaksanaan tata kelola yang baik atas nama pemangku kepentingan; memungkinkan keputusan investasi yang lebih baik dan kelancaran pasar modal; dan sebagai bentuk regulasi tidak langsung yang mencapai tujuan regulator (Spira & Page, 2009). Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan sebaiknya mengungkapkan informasi yang bersifat positif maupun negatif bagi perusahaan.

Badan regulator Indonesia mengeluarkan aturan mengenai pengungkapan informasi yang dibutuhkan pada laporan tahunan. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengungkapan informasi mengenai sistem pengendalian perusahaan.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu (KNKG, Sistem Pelaporan

Pelanggaran - SPP (*Whistleblowing System - WBS*), 2008:2). *Whistleblowing system* merupakan proses dimana *whistleblower* mencoba mengerahkan kekuatannya untuk mempengaruhi organisasi atau beberapa anggotanya untuk menghentikan kesalahan yang dilakukan (Dasgupta & Kesharwani, 2010:60). *Whistleblowing system* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Pengungkapan sistem perusahaan yang memadai pada laporan tahunan dapat meningkatkan citra perusahaan, sehingga harus dikelola oleh perusahaan dengan memadai.

Hingga saat ini, masih banyak perusahaan, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang belum mengungkapkan informasi *whistleblowing system* pada laporan tahunannya dengan memadai, bahkan masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan sistem tersebut pada laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan perusahaan masih belum memiliki sistem tersebut atau bahkan belum mengerti peranan penting dari pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan. Selain itu, alasan lain perusahaan belum mengungkapkan *whistleblowing system* secara memadai pada laporan tahunannya yaitu karena ketidakjelasan regulator dalam menguraikan komponen *whistleblowing system* yang harus diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Untuk itu penulis melakukan mengenai pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode waktu 2014-2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengumpulan informasi awal dan fenomena yang terjadi mengenai pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan perusahaan publik, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perusahaan publik di Indonesia sudah mematuhi peraturan dari Bapepam-LK mengenai pengungkapan *whistleblowing system*?
2. Bagaimana perbandingan pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan publik yang termasuk indeks LQ45 dengan non-LQ45?
3. Apakah sektor yang memiliki regulasi khusus mengenai *whistleblowing system* lebih unggul dalam pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan

tahunannya dibandingkan dengan sektor yang tidak memiliki regulasi khusus mengenai *whistleblowing system*?

4. Mengapa *whistleblowing system* penting bagi perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pentingnya kepatuhan akan regulasi pengungkapan *whistleblowing system* pada perusahaan publik di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK.
2. Mengetahui dan menjelaskan perbandingan pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan publik yang tergolong indeks LQ45 dengan non-LQ45.
3. Mengetahui dan menjelaskan perbandingan pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan publik di setiap sektor.
4. Mengetahui dan menjelaskan peranan penting *whistleblowing system* bagi perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa saran atau masukan bagi manajemen perusahaan terkait dengan pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan.
2. Pemerintah
Penulis berharap dapat memberikan masukan kepada regulator (Bapepam-LK) untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan peraturan mengenai pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan.

3. Pembaca

Penulis berharap dapat memberikan informasi dan referensi dalam penelitian mengenai pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan di masa yang akan datang.

1.5. Kerangka Penelitian

Pada umumnya, perusahaan ingin membangun citra perusahaan yang baik di mata investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk membangun citra tersebut, perusahaan mengikuti pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan menerapkan tata kelola yang baik, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan tahunan untuk membantu pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan perusahaan.

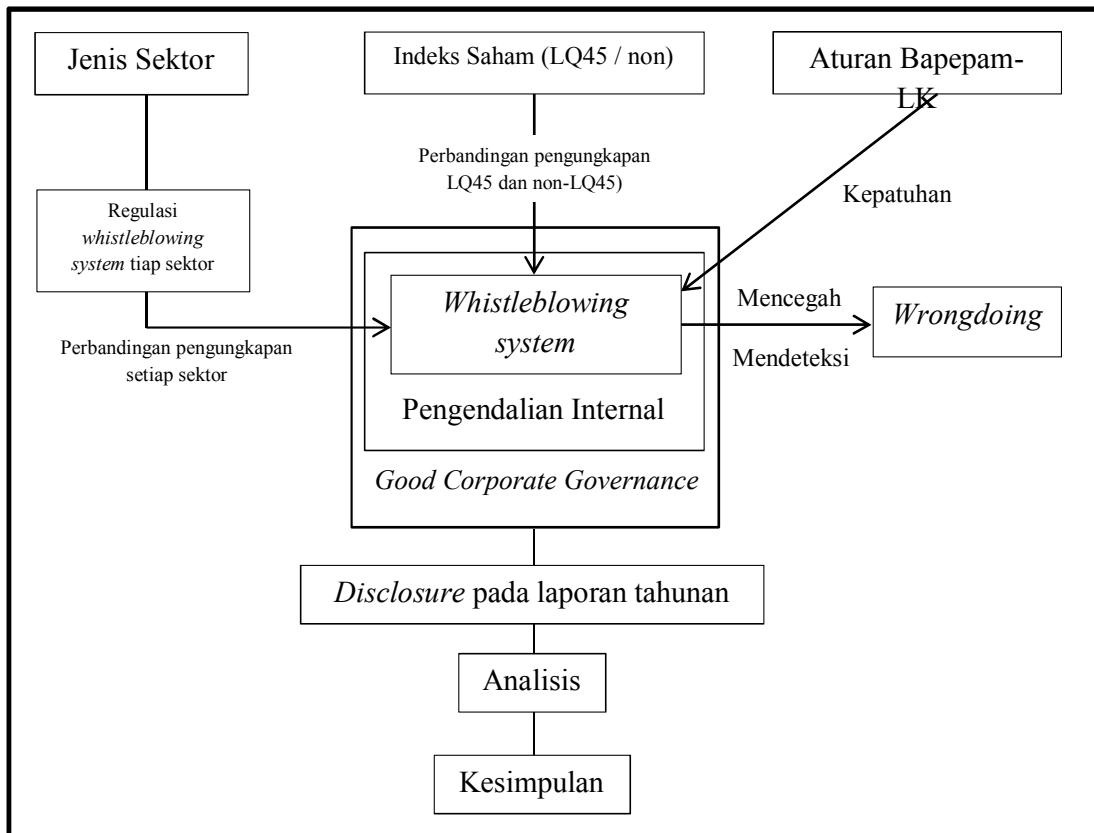
Dalam suatu perusahaan seringkali terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan membutuhkan sistem mengenai pelaporan pelanggaran oleh orang ketiga, yang biasa dikenal dengan nama *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan salah satu bentuk dari penerapan pengendalian internal. Dengan merancang dan menerapkan *whistleblowing system* yang efektif dan efisien, perusahaan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan kesalahan maupun pelanggaran dalam perusahaan.

Indonesia telah memiliki regulasi terkait dengan pengungkapan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan, terutama untuk perusahaan publik. Laporan tahunan (*annual report*) merupakan laporan yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan setahun sekali yang berisi informasi finansial dan non-finansial perusahaan yang berguna bagi pihak *stakeholders* untuk menganalisis kondisi perusahaan pada periode tersebut (Devi, Budiasih, & Badera, 2017:26). *Whistleblowing system* masih merupakan hal yang baru di Indonesia. *Whistleblowing system* diterbitkan di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 10 November 2008 (Wardani & Sulhani, 2017:31). Badan regulator Indonesia juga mengeluarkan aturan mengenai pengungkapan informasi yang dibutuhkan pada laporan tahunan. Peraturan Badan

Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan perusahaan untuk melaporkan *whistleblowing system* pada laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan publik terhadap peraturan Bapepam-LK dalam mengungkapkan *whistleblowing system* pada laporan tahunannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengungkapan perusahaan yang tergolong indeks LQ45 dengan non-LQ45, serta perbandingan di setiap sektor. Penulis akan melakukan analisis *trend* perusahaan melalui data sekunder, yaitu laporan tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan 2016. Penelitian dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari setiap sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, di setiap sektor perusahaan akan diambil yang termasuk ke dalam indeks LQ45 maupun non-LQ45. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis kesadaran perusahaan terhadap pentingnya pengungkapan *whistleblowing system* di Indonesia. Hal ini dilihat dari peningkatan atau penurunan mengenai pengungkapan *whistleblowing system* di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis

1.6. Periode Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan publik pada periode pelaporan tahun 2014 sampai 2016.